



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021



**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A  
Watampone Sulawesi Selatan, Indonesia 92716**

## KATA PENGANTAR



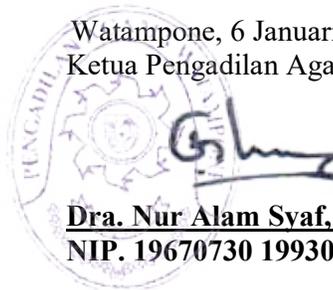
Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Laporan ini menggambarkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan Pengadilan Agama Watampone selama tahun 2021, meliputi keadaan perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, serta pengawasan.

Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas keterlibatan, kerja keras, dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, namun atas kerja sama yang baik dari semua pihak, laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu. Segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur serta evaluasi pekerjaan kami di masa mendatang. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.

Watampone, 6 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Watampone



**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670730 199303 2 006**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA .....</b>	<b>5</b>
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama .....	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	7
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	7
B. Penyelesaian Perkara .....	8
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus .....	8
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu .....	9
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum..... Banding, Kasasi, dan PK .....	10
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi .....	11
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	11
1. Posbakum .....	12
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	13
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	15
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>17</b>
1. Mutasi .....	24
2. Promosi .....	25
3. Pensiun.....	26
4. Diklat ... ..	27
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>29</b>
A. Pengelolaan Keuangan .....	29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	34
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	40

1. Implementasi e-Court .....	40
2. Implementasi SIPP .....	43
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>47</b>
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	47
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	48
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	52
<b>BAB VI PENGAWASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Internal .....	59
B. Evaluasi .....	60
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi .....	62
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### BAB II

Tabel 2.1	Matrik Keadaan Perkara pada Wialayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 .....	5
Tabel 2.2	Jumlah Perkara yang diputus Tahun 2021 .....	6
Tabel 2.3	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021. ....	6
Tabel 2.4	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021. ....	7
Tabel 2.5	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021.....	7
Tabel 2.6	Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2020 .....	8
Tabel 2.7	Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2020 .....	8
Tabel 2.8	Rentang Waktu Penyelesaian Perkara .....	9
Tabel 2.9	Data Pelaksanaan Mediasi .....	11
Tabel 2.10	Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) .....	13
Tabel 2.11	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling.....	14
Tabel 2.12	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu.....	15
Tabel 2.13	Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo .....	16

### BAB III

Tabel 3.1	Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan .....	18
Tabel 3.2	Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	20
Tabel 3.3	Daftar Mutasi Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone .....	24
Tabel 3.4	Daftar Promosi Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone .....	26
Tabel 3.5	Daftar Pensiun Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone .....	26
Tabel 3.6	Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada	

Tahun 2021 .....	27
------------------	----

#### **BAB IV**

Tabel 4.1 Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2021 .....	33
Tabel 4.2 Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone.....	34
Tabel 4.3 Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone .....	35
Tabel 4.4 Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone .....	35
Tabel 4.5 Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Watampone .....	37
Tabel 4.6 Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah.....	39
Tabel 4.7 Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 .....	42
Tabel 4.8 Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2021 .....	43

## DAFTAR GAMBAR

### BAB I

Gambar 1.1	Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta.....	1
------------	--	---

### BAB II

Gambar 2.1	Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara .....	10
------------	--	----

### BAB III

Gambar 3.1	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	20
Gambar 3.2	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	23
Gambar 3.3	Diagram Persentase Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial.....	23
Gambar 3.4	Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial .....	24

### BAB IV

Gambar 4.1	Diagram Realisi Anggaran DIPA Satker 309076.....	33
Gambar 4.2	Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone .....	44

### BAB V

Gambar 5.1	Pembukaan Evaluasi Implementasi APM tanggal 12 November 2021 .....	48
Gambar 5.2	Tampilan Halaman Awal Aplikasi SIPETTUNI.....	53
Gambar 5.3	Tampilan Halaman untuk Pengguna.....	53
Gambar 5.4	Tampilan Halaman untuk Admin.....	54
Gambar 5.5	Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPENGAMPU.....	55
Gambar 5.6	Tampilan Halaman Dashboard SIPENGAMPU.....	55
Gambar 5.7	Tampilan Bagian Home (Sebelum Login).....	57
Gambar 5.8	Tampilan Menu Perencanaan Satker 307509 (Dashboard).	58
Gambar 5.9	Tampilan Dashboard (Setelah User Login).....	58



Secara astronomis, kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan kabupaten Bone beriklim tropis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pengadilan Agama Watampone beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, kelurahan Tibojong, kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, propinsi Sulawesi Selatan. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 372 desa / kelurahan.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah kabupaten Bone, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Watampone berfungsi menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

### **Visi, Misi, dan Sasaran Strategis**

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi Pengadilan Agama Watampone adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Watampone adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Watampone berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Watampone untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan

sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator :

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- d. Index kepuasan pencari keadilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
- d. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

**BAB II**  
**KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA**  
**PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA**

**A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama**

**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Pada tahun 2020 terdapat 211 sisa perkara yang diproses di tahun 2021. Tabel berikut ini memperlihatkan keadaan perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 :

Tabel 2.1  
Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum  
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Cerai Gugat	1013	1112	51	150 sisa perkara tahun 2020 diputus
2	Cerai Talak	273	304	10	41 sisa perkara tahun 2020 diputus
3	Harta Bersama	7	6	3	2 sisa perkara tahun 2020 diputus
4	Kewarisan	9	11	1	3 sisa perkara tahun 2020 diputus
5	Pengangkatan Anak	3	3	1	1 sisa perkara tahun 2020 diputus
6	Pengesahan / Itsbat Nikah	738	743	0	5 sisa perkara tahun 2020 diputus
7	Dispensasi Kawin	62	66	0	4 sisa perkara tahun 2020 diputus
8	Wali Adhal	7	7	0	-
9	Perwalian	16	16	0	-

10	Penetapan Ahli Waris	102	107	0	5 sisa perkara tahun 2020 diputus
11	Poligami	1	1	0	-
12	Lain – lain	7	7	0	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2238</b>	<b>2383</b>	<b>66</b>	

Tabel 2.2  
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2021

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	33	108
2	Februari	27	112
3	Maret	166	168
4	April	69	119
5	Mei	21	76
6	Juni	27	109
7	Juli	89	137
8	Agustus	74	128
9	September	101	106
10	Oktober	142	110
11	Nopember	161	133
12	Desember	30	137
	<b>Total</b>	<b>940</b>	<b>1443</b>

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	2 Februari 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	995/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	15 Februari 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama

3	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	27 April 2021	Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama
4	364/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Juli 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
5	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Oktober 2021	Dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding, Pembanding I
6	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	25 Oktober 2021	Dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding, Pembanding II
7	801/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	8 November 2021	Dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding
8	206/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	23 November 2021	Dalam proses Tingkat Pertama

### 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2021, hanya terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4  
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	2 Agustus 2021	Dalam Proses Tingkat Kasasi

### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) pada tahun 2021.

Tabel 2.5  
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juni 2021
2	544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.	22 Juni 2021

## B. Penyelesaian Perkara

Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Watampone sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Berikut ini merupakan gambaran tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 :

### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

#### a. Perkara Permohonan (Volunter)

Terdapat 15 sisa perkara Permohonan (Volunter) tahun 2020 yang diputus / diselesaikan di tahun 2021. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6  
Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Pengesahan/Itsbat Nikah	5
2.	Dispensasi Kawin	4
3.	Penetapan Ahli Waris	5
4.	Lain – lain	1
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

#### b. Perkara Gugatan (Contentius)

Sisa perkara Gugatan tahun 2020 sebanyak 196 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	41
2.	Cerai Gugat	150
3.	Harta Bersama	2

4.	Kewarisan	3
<b>Jumlah</b>		<b>196</b>

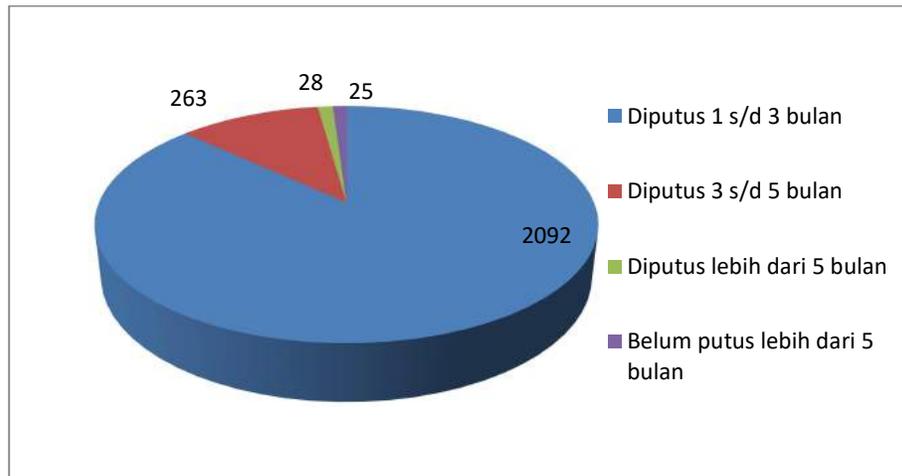
Berdasarkan tabel 2.6 dan tabel 2.7, maka jumlah sisa perkara tahun 2020 yang diputus / diselesaikan pada tahun 2021 adalah 211 perkara (15 +196).

## 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 2.8  
Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	124	15	2	0	
2	Februari	120	18	1	2	
3	Maret	296	36	2	0	
4	April	156	30	2	3	
5	Mei	72	23	2	2	
6	Juni	100	34	2	3	
7	Juli	204	18	4	3	
8	Agustus	179	19	4	3	
9	September	192	13	2	3	
10	Oktober	234	15	3	3	
11	Nopember	272	21	1	3	
12	Desember	143	21	3	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>2092</b>	<b>263</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	
	<b>Total</b>	<b>2355</b>		<b>28</b>	<b>25</b>	

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) pada tahun 2021 sebanyak 2.355 perkara.



Gambar 2.1  
Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

### 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

#### a. Banding

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara, dari 2383 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2375 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,66 %.

#### b. Kasasi

Berdasarkan tabel 2.4, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dari 2383 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2382 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 99,96 %.

#### c. Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2.5, sebanyak 2 perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2021, dari 2383 perkara yang diselesaikan.

Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 2381 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 99,92 %.

#### 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara, dan Pengadilan Agama Watampone tahun 2021 telah melaksanakan proses mediasi. Realisasi pelaksanaan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9  
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	15	1	9	5
2	Februari	22	0	16	6
3	Maret	18	1	11	6
4	April	13	2	6	5
5	Mei	11	0	3	8
6	Juni	16	2	6	8
7	Juli	13	0	5	8
8	Agustus	12	0	3	9
9	September	14	0	7	7
10	Oktober	20	1	9	10
11	Nopember	22	2	14	6
12	Desember	19	2	7	<b>10</b>
<b>Jumlah</b>		<b>195</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 hanya 11 perkara.

#### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah salah satu standar dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Pada tahun 2017,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menetapkan diri untuk menerapkan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). SAPM diperlukan untuk mengukur profesionalitas dan transparansi organisasi / satuan kerja.

Suatu organisasi / satuan kerja yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat sudah semestinya mengikuti secara berkelanjutan program tersebut agar mencapai nilai yang lebih baik dan menciptakan keunggulan komparatif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Watampone senantiasa mengacu dan berpedoman pada sertifikasi SAPM yang telah disusun oleh Dirjen Badilag. Pengadilan Agama Watampone berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan.

Berikut ini beberapa kegiatan unggulan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan, sebagaimana uraian kegiatan dalam Penetapan Kinerja, yaitu :

#### **1. PosBaKum (Pos Bantuan Hukum)**

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan / permohonan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020, Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 menerima anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) sebesar Rp 69.500.000,- (*enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan

target 691 jam layanan, 1000 orang. Kegiatan PosBaKum dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki sesuai kontrak perjanjian kerjasama Nomor W20-A2/117/HM.01.1/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.000.000,- (*enam puluh sembilan juta rupiah*).

Tabel 2.10  
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	0	0,-	0
2	Februari	60	Rp. 6.000.000,-	103
3	Maret	60	Rp. 6.000.000,-	137
4	April	60	Rp. 6.000.000,-	122
5	Mei	60	Rp. 6.000.000,-	87
6	Juni	30	Rp. 3.000.000,-	76
7	Juli	60	Rp. 6.000.000,-	164
8	Agustus	60	Rp. 6.000.000,-	112
9	September	60	Rp. 6.000.000,-	122
10	Oktober	60	Rp. 6.000.000,-	114
11	Nopember	60	Rp. 6.000.000,-	136
12	Desember	121	Rp. 12.000.000,-	168
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 69.000.000,-</b>	<b>1.341</b>

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 1.341 perkara yang terlayani dalam 691 Jam Layanan. Dengan demikian, realisasi kegiatan layanan PosBaKum sebesar 134,1 %, melebihi target.

## 2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

### a. Sidang di luar gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan atau biasa disebut (sidang keliling), khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung

pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Kegiatan sidang di luar gedung bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik dan geografis.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung sejumlah Rp 42.578.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dengan target 17 kegiatan.

Tabel 2.11  
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Kahu	2	27	Rp. 4.992.000,-
2	Barebbo	2	36	Rp. 5.065.000,-
3	Lappariaja	2	20	Rp. 4.992.000,-
4	Cina	2	20	Rp. 5.065.000,-
5	Tellu Limpoe	2	28	Rp. 4.992.000,-
6	Cenrana	2	16	Rp. 4.992.000,-
7	Salomekko	2	10	Rp. 4.992.000,-
8	Lamuru	3	51	Rp. 7.488.000,-
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>208</b>	<b>Rp 42.578.000,-</b>

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar gedung yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 208 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 42.578.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling.

#### b. Sidang Pelayanan Terpadu

Sidang Pelayanan Terpadu yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas

Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Pelayanan Sidang Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Tabel 2.12  
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	79	Rp. 6.300.000,-
2	Palakka	1	45	Rp. 6.300.000,-
3	Amali	1	45	Rp. 6.300.000,-
4	Lamuru	2	54	Rp. 12.600.000,-
5	Lappariaja	1	47	Rp. 6.300.000,-
6	Cina	1	42	Rp. 6.300.000,-
7	Salomekko	1	21	Rp. 6.300.000,-
	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>333</b>	<b>Rp. 50.400.000,-</b>

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 333 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.400.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat Sidang Pelayanan Terpadu.

### 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang

yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran perkara prodeo pada tahun 2021 sejumlah Rp 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), dengan target 35 perkara.

Tabel 2.13  
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Serapan Anggaran / Bulan
1	Januari	-	-
2	Februari	3	Rp. 1.360.000,-
3	Maret	36	Rp. 6.480.000,-
4	April	2	Rp. 810.000,-
5	Mei	6	Rp. 2.490.000,-
6	Juni	1	Rp. 420.000,-
7	Juli	31	Rp. 5.820.000,-
8	Agustus	1	Rp. 120.000,-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	Nopember	-	-
12	Desember	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>Rp. 17.500.000,-</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani pada tahun 2021 sebanyak 80 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 17.500.000,-. Semua perkara prodeo berhasil diselesaikan.

### **BAB III**

## **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi suatu organisasi dan sangat menentukan keberhasilan tujuan organisasi tersebut. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, yang merupakan lembaga terhormat, peranan SDM tidak saja penting secara organisasi, tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis.

Untuk memperkuat fungsi organisasi pada Pengadilan Agama Watampone, dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan profesional, terutama untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas SDM itu sendiri yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi Pengadilan Agama Watampone perlu diperkuat dan ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum, khususnya peradilan agama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan.

Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi dalah penataan manajemen SDM. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatan. Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

Secara umum, SDM peradilan dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah adalah SDM teknis yudisial, terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Kelompok kedua adalah SDM non teknis yudisial, terdiri dari Sekretaris, Kasubbag, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

---

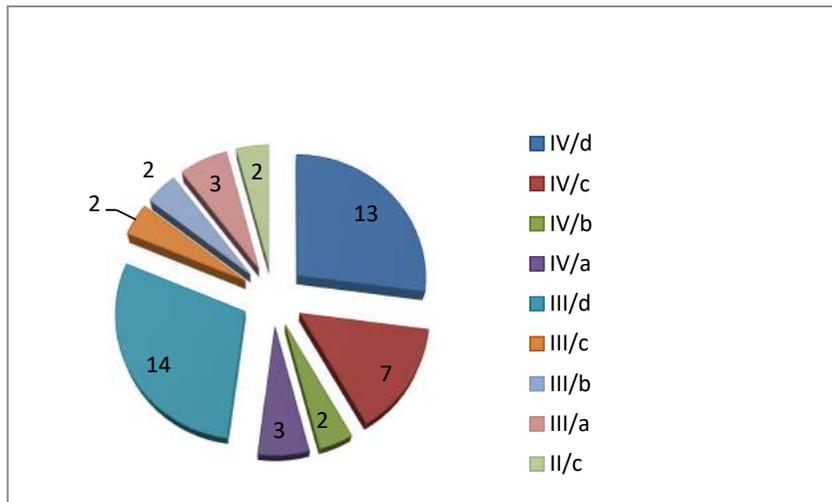
SDM yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

No	Nama	Pangkat / Gol.	Jabatan
1	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
2	Drs. H. Muh. Yusuf Hs., S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
3	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
4	Dra. H. Muhammadong, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
5	Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
6	Drs. Dasri Akil, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
7	Drs. H. M. Tang, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
8	Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
9	Drs. H. M. Suyuti, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
10	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
11	Dra. Hj. St. Aisyah, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
12	Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
13	Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
14	Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Ketua
15	Drs. Nurmaali	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
16	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
17	Dra. St. Mahdianah K., M.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
18	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
19	Dra. Hj. Ernawati, M.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim

20	Drs. Abd. Rahman	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
21	Drs. H. Rahmading, M.H.	Pembina Tk.I, IV/b	Panitera
22	Andi Maryam, S.Ag., M.H.	Pembina Tk.I, IV/b	Hakim
23	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.	Pembina IV/a	Sekretaris
24	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
25	Haris, S.H.I., M.Sy.	Pembina, IV/a	Panitera Pengganti
26	Dra. Hunaena, M.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
27	Dra. Hj. Munirah	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan
28	Dra. Hj. Rosmini	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
29	Dra. St. Naisyah	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
30	Drs. Jamaluddin	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum
31	Bintang, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Permohonan
32	Siti Jamilah, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
33	Andi Suardi, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
34	Hj. Asmah, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian. Organisasi Dan Tata Laksana
35	Hj. Kartini, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
36	Dra. Hj. Samsang	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
37	Hj. Fitriani, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
38	Muhammad Suardi, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Jurusita
39	Maftukha Mustafa, S.Kom.	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan
40	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	Penata, III/c	Panitera Pengganti
41	Muhammad Syahrani, S.H.	Penata, III/c	Juru Sita
42	Ridmajayanti, S.Sos.	Penata Muda Tk. I, III/b	Juru Sita
43	Agustiawati, S.E., S.H.	Penata Muda Tk. I, III/b	Juru Sita
44	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P.	Penata Muda, III/a	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
45	Heriawati, S.H.	Penata Muda, III/a	Juru Sita
46	Panggih Tridarma, S.Kom.	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer
47	Rofika Khoirontun Nisa,	Pengatur, II/c	Arsiparis Pelaksana

	A.Md.		
48	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara



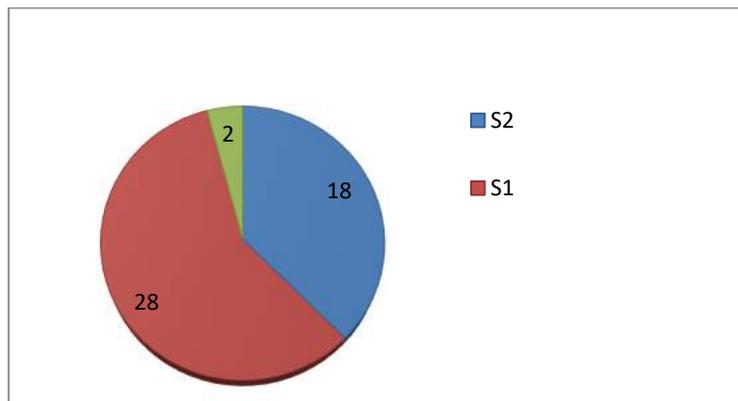
Gambar 3.1  
Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 3.2  
Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Nama	Pendidikan Terakhir		Jabatan
		Tingkat Ijazah	Tempat Pendidikan	
1	Drs. H. M. Tang, S.H., M.H.	S2	Universitas Hasanuddin	Hakim
2	Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	S2	Universitas Indonesia Timur	Hakim
3	Drs. H. M. Suyuti, M.H.	S2	Universitas Islam Jakarta	Hakim
4	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	S2	UMI	Ketua
5	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	S2	UMI	Wakil Ketua
6	Dra. St. Mahdianah K., S.H., M.H.	S2	Universitas Indonesia Timur	Hakim
7	Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.	S2	IAIN Alauddin Makassar	Hakim
8	Dra. Hj. Siti Amirah,	S2	Universitas	Hakim

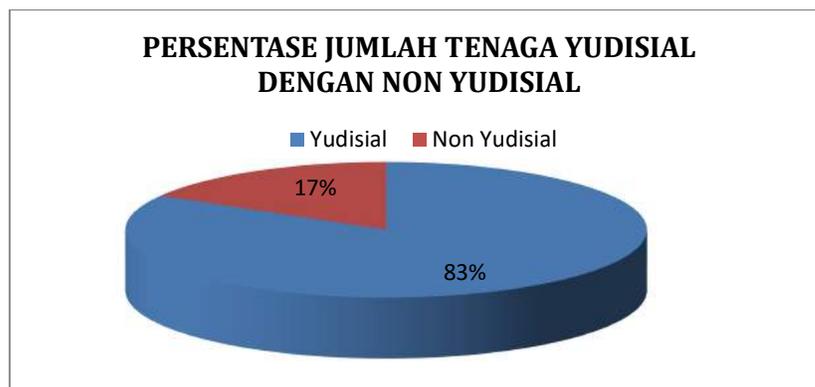
	M.H.		Cenderawasih	
9	Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.	S2	UMI	Hakim
10	Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.	S2	Akademi Teknologi Negeri Purworejo	Hakim
11	Dra. Hj. Ernawati, M.H.	S2	UMI	Hakim
12	Drs. H. Muhammadong, M.H.	S2	UMI	Hakim
13	Drs. H. Rahmading, M.H.	S2	UMI	Panitera
14	H.Andi Fajar Sjam S., S.E., M.Si.	S2	Universitas Hasanuddin	Sekretaris
15	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	S2	STAIN Watampone	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
16	Haris, S.H.I., M.Sy.	S2	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
17	Dra.Hunaena, M.H.	S2	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
18	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	S2	UIN Alauddin Makassar	Panitera Pengganti
19	Drs. H. Muh.Yusuf Hs., S.H.	S1	Universitas Hasanuddin	Hakim
20	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.	S1	STIH Lamaddukelleng Sengkang	Hakim
21	Dra. Hj. Khaeriyah	S1	IAIN Alauddin Makassar	Hakim
22	Drs. Dasri Akil, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Hakim
23	Drs. Nurmaali	S1	IAIN Watampone	Hakim
24	Drs. Abd. Rahman	S1	Universitas Satria Makassar	Hakim
25	Dra. Hj. Badriyah	S1	IAIN Alauddin	Hakim
26	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	S1	IAIN Alauddin	Hakim
27	Dra. Hj. St. Aisyah, S.H.	S1	Univ Ibnu Chaidun Jakarta	Hakim
28	Dra. Hj. Munirah	S1	IAIN Alauddin	Panmud Gugatan
29	Drs. Jamaluddin	S1	IAIN Alauddin	Panmud Hukum
30	Bintang, S.H.	S1	Universitas 45 Makassar	Panmud Permohonan
31	Hj. Asmah, S.H.	S1	STIH	Kepala Sub Bagian

			Pengayoman Watampone	Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
32	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	S1	UIN Alauddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan
33	Dra. Hj. Rosmini	S1	IAIN Alauddin	Panitera Pengganti
34	Dra. St. Naisyah	S1	IAIN Alauddin	Panitera Pengganti
35	Siti Jamilah, S.H.	S1	UMI	Panitera Pengganti
36	Andi Suardi, S.Ag.	S1	STAIN Watampone	Panitera Pengganti
37	Hj. Kartini, S.H.	S1	Univ. Muhammadiyah Palu	Panitera Pengganti
38	Hj. Fitriani, S.Ag.	S1	UMI	Panitera Pengganti
39	Dra. Hj. Samsang	S1	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
40	Muhammad Suardi, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
41	Muhammad Syahrani, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
42	Ridmajayanti, S.Sos.	S1	STIA Puangrimag- galatung	Juru Sita
43	Agustiawati, S.E., S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
44	Heriawati, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
45	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P.	S1	Univ. Brawijaya	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
46	Panggih Tridarma, S.Kom.	S1	Univ. Diponegoro	Pranata Komputer.
47	Rofika Khoirun Nisa, A.Md.	D-III	Politeknik Negeri Semarang	Arsiparis Pelaksana
48	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	D-III	Univ. Jenderal Sudirman	Pengelola Barang Milik Negara

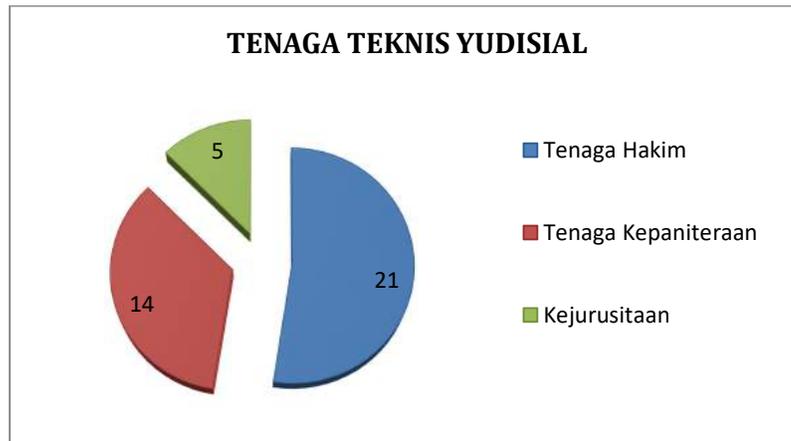


Gambar 3.2  
Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam periode tahun 2021, sesuai perkembangan struktur organisasi Peradilan Agama, keadaan SDM teknis yudisial dan non teknis yudisial di Pengadilan Agama Watampone adalah terdapat 21 orang Hakim, 14 orang Kepaniteraan dan 5 orang Juru Sita, serta Kesekretariatan sebanyak 8 orang. Adapun perkembangan SDM pada Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3.3  
Diagram Persentase Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial



Gambar 3.4  
Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial

## 1. Mutasi

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi, jabatan, tempat maupun pekerjaan yang dilakukan, baik secara horisontal maupun vertikal dalam suatu organisasi.

Upaya ini dilakukan Mahkamah Agung terhadap SDM, khususnya pada Pengadilan Agama Watampone yang menjadi bagian dari fungsi pengembangan SDM karena tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, mutasi ini juga menjadi stimulus bagi SDM untuk meningkatkan kinerjanya, dan bagi Pengadilan Agama Watampone berguna untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan komposisi pekerjaan/jabatan.

Perkembangan mutasi tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Daftar Mutasi Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Drs. Adaming, S.H., M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Sidoarjo
2	Drs. H. M. Thahir Hi Salim, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PTA Maluku Utara
3	Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Jakarta Utara

4	Drs. Muslimin, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Jakarta Utara
5	Dra. Siarah, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Jakarta Timur
6	Sudirman, S.H.	Panitera PA Watampone	Panitera Pengganti PTA Makassar
7	Misbah Nasri Sailellah, S.HI.	Pengelola Kepegawaian PA Watampone	Panitera Pengganti PA Sengkang
8	Heriawati, S.H.	Jurusita Pengganti PA Watampone	Jurusita PA Watampone
9	Agustiawati, S.E., S.H.	Jurusita Pengganti PA Watampone	Jurusita PA Watampone
10	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Palu	Wakil Ketua PA Watampone
11	Drs. Abd. Rahman	Ketua PA Makale	Hakim PA Watampone
12	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	Hakim PA Blitar	Hakim PA Watampone
13	Hj. St. Aisyah S., S.H.	Hakim PA Sengkang	Hakim PA Watampone
14	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	Hakim PA Kodya Malang	Hakim PA Watampone
15	Drs. Muhammadong, M.H.	Hakim PA Kendari	Hakim PA Watampone
16	Drs. Nurmaali	Hakim PA Sengkang	Hakim PA Watampone
17	Drs. H. Rahmading, M.H.	Panitera PA Kendari	Panitera PA Watampone
18	Hj. Fitriani, S.Ag.	Panitera Muda Hukum PA Sengkang	Panitera Pengganti PA Watampone

## 2. Promosi

Promosi merupakan suatu perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki status yang lebih tinggi. Landasan para pengambil kebijakan memberi promosi kepada pegawai tertentu adalah kepercayaan terhadap kejujuran, kemampuan/kompetensi dan kecakapan pegawai tersebut. Tujuan Mahkamah Agung memberikan promosi pada SDM Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar sehingga dapat menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi

dan status sosial yang semakin tinggi. Selain itu untuk memotivasi pegawai yang menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikannya promosi tersebut.

Tabel 3.4  
Daftar Promosi Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Drs. H. M. Thahir Hi Salim, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PTA Maluku Utara
2	Sudirman, S.H.	Panitera PA Watampone	Panitera Pengganti PTA Makassar
3	Misbah Nasri Saillellah, S.HI.	Pengelola Kepegawaian PA Watampone	Panitera Pengganti PA Sengkang
4	Heriawati, S.H.	Jurusita Pengganti PA Watampone	Jurusita PA Watampone
5	Agustiawati, S.E., S.H.	Jurusita Pengganti PA Watampone	Jurusita PA Watampone
6	Hj. St. Aisyah S., S.H.	Hakim PA Sengkang	Hakim PA Watampone
7	Drs. Nurmaali	Hakim PA Sengkang	Hakim PA Watampone

### 3. Pensiun atau Meninggal Dunia

Pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Pada tahun 2021, terdapat pegawai maupun hakim Pengadilan Agama Watampone yang memasuki usia pensiun atau meninggal.

Tabel 3.5  
Daftar Pensiun Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.	Hakim PA Watampone	Pensiun
2	Dr. H. M. Hasby, M.H.	Hakim PA Watampone	Meninggal
3	Drs. M. Yahya	Hakim PA Watampone	Pensiun
4	Drs. Salahuddin, S.H., M.H.	Hakim PA Watampone	Pensiun
5	Drs. Kalimang, M.H.	Hakim PA Watampone	Pensiun

#### 4. Diklat ( Pendidikan dan Pelatihan )

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Tujuan dilaksanakannya program diklat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik.

Tabel 3.6  
Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2021

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Lama Diklat
1	Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	22 Februari s/d 9 Maret
2	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	Pelatihan Online Jaringan Media dan Kehumasan	15 s/d 19 Maret 2021
3	Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Jaringan Media dan Kehumasan	15 s/d 19 Maret 2021
4	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Pelayanan Prima di Pengadilan	15 s/d 19 Maret 2021
5	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Pelatihan Online Public Speaking and Effective Communication Skill	15 s/d 18 Maret 2021
6	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Public Speaking and Effective Communication Skill	15 s/d 18 Maret 2021
7	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Pelatihan Online Penyegaran PPSPM	29 Maret s/d 5 April 2021
8	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja	7 s/d 11 Juni 2021
9	Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	7 s/d 26 Juni 2021
10	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja	5 s/d 9 Juli 2021
11	Rofika Khoirotn Nisa, A.Md	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning	21 Juli s/d 12 Oktober 2021

12	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning	21 Juli s/d 12 Oktober 2021
13	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Pelatihan Online Manajemen Aset	2 s/d 6 Agustus 2021
14	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.	Pelatihan Online Pengendalian Inter atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	2 s/d 6 Agustus 2021
15	Drs. H. Rahmading, M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	16 Agustus s/d 2 September 2021
16	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator (PKA)	6 September s/d 15 Desember 2021
17	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator (PKA)	6 September s/d 15 Desember 2021
18	Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	13 s/d 24 September 2021
19	Andi Suardi, S.Ag.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	16 November s/d 2 Desember 2021

Peningkatan kualitas SDM secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk PNS atau aparatur agar dicapainya kompetensi tertentu.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,**  
**SERTA TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sejumlah Rp 15.019.317.000,- (*lima belas milyar sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*). Namun setelah revisi pengurangan Belanja Pegawai dan penambahan anggaran dari BUA berupa tambahan pakaian dinas pegawai non hakim, tambahan pakaian kerja PPNPN, anggaran menjadi Rp 12.228.481.000,- (*dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sejumlah Rp179.978.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Selama tahun anggaran 2021 telah dilakukan revisi DIPA 307509 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
  - 2) Revisi II tanggal 15 April 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
  - 3) Revisi III tanggal 12 Juli 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
  - 4) Revisi IV tanggal 1 Oktober 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (pengurangan anggaran belanja pegawai).
  - 5) Revisi V tanggal 13 Oktober 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
-

- 6) Revisi VI tanggal 23 November 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (pengurangan anggaran belanja pegawai dan penambahan anggaran pakaian dinas pegawai non hakim serta pakaian kerja PPNPN).
- 7) Revisi VII tanggal 22 Desember 2021 tentang pemutakhiran POK.
- 8) Revisi VIII tanggal 27 Desember 2021 tentang pemutakhiran POK.

Selama tahun anggaran 2021 telah dilakukan revisi DIPA 309076 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 13 April 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 6 Agustus 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 4) Revisi IV tanggal 14 Oktober 2021 tentang perubahan halaman III DIPA.

Program – program pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021 :

**1. Program Dukungan Manajemen :**

**a. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)**

- |              |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1) Pagu      | Rp 10.748.097.000,- | ( setelah revisi) |
| 2) Realisasi | Rp 10.309.718.814,- | ( 95,92 % )       |
| 3) Sisa      | Rp 438.378.186,-    | ( 4,08 % )        |

**b. Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)**

- |             |                    |                   |
|-------------|--------------------|-------------------|
| - Pagu      | Rp 1.410.384.000,- | ( setelah revisi) |
| - Realisasi | Rp 1.410.373.368,- | ( 99,9992 % )     |
| - Sisa      | Rp 10.632,-        | ( 0,0008 % )      |

**c. Layanan Umum**

- |             |                |          |
|-------------|----------------|----------|
| - Pagu      | Rp 5.000.000,- |          |
| - Realisasi | Rp 1.750.000,- | ( 35 % ) |
| - Sisa      | Rp 3.250.000,- | ( 65 % ) |

**d. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

- |             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| - Pagu      | Rp 65.000.000,- |             |
| - Realisasi | Rp 64.950.500,- | ( 99,92 % ) |
| - Sisa      | Rp 49.500,-     | ( 0,08 % )  |

Komponen yang terdapat pada program ini terdiri dari :

- a. Komponen 001 (Gaji dan Tunjangan)
- b. Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) :
  - 1) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran :
    - a) Belanja Keperluan Perkantoran
      - Penjilidan/Cetak/Cek
      - Air Minum/Galon
      - Langganan Surat Kabar
      - Jasa Satpam, Supir dan Pramubakti
    - b) Belanja Barang Operasional lainnya
      - Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya
    - c) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
      - Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
  - 2) Langganan Daya dan Jasa:
    - a) Belanja Keperluan Perkantoran
      - Langganan Internet
      - Langganan Web Hosting
      - Langganan Lisensi Video Conference
    - b) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
    - c) Langganan Listrik
    - d) Langganan Telepon
    - e) Langganan Air (PDAM)
  - 3) Pemeliharaan Kantor:
    - a) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
      - Pemeliharaan Gedung Kantor
      - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
      - Pemeliharaan Pos Jaga
    - b) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
      - Pemeliharaan Rumah Dinas
    - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
  - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
  - Bahan Bakar Genset
  - Pemeliharaan A.C. Split
  - Pemeliharaan Printer
  - Pemeliharaan Genset
  - Pemeliharaan P.C
  - Pemeliharaan Laptop/Notebook
- 4) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional :
- a) Honor Operasional Satuan Kerja;
  - b) Belanja Barang Operasional Lainnya : Pakaian Dinas Pegawai non Hakim, Satpam, Sopir dan Pramubakti.
- 5) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
- a) Bahan/Spanduk/Dokumentasi
- 6) Rapat Koordinasi Internal
- a) Konsumsi
- 7) Konsultasi ke Tingkat Banding
- a) Perjalanan Dinas Biasa
- 8) Konsultasi ke KANWIL DjPb / KPKNL
- a) Perjalanan Dinas Biasa
- 9) Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
- a) Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim
- 10) Penanggulangan COVID-19
- a) Masker/Hand Sanitizer
- c. Komponen 052 (Non Operasional Satker Daerah)
- 1) Penanganan Pandemi Covid-19 (Rapid Test)
- d. Komponen 052 (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)
- 1) PC Kepaniteraan
  - 2) Mesin Antrian Sidang

Pelaksanaan anggaran tahun 2021 DIPA 307509 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi karena adanya sisa anggaran Belanja Pegawai dan Penanganan Pandemi Covid-19 (Rapid Test), dan akun tersebut tidak bisa digeser ke akun lain sehingga realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 96,39 %.

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Belanja Barang DIPA BADILAG / 309076)

Program penegakan dan pelayanan hukum ini hasilnya adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama Watampone.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pemberian bantuan pembebasan biaya perkara, operasional pos bantuan hukum, pelaksanaan sidang di luar gedung dan sidang pelayanan terpadu.

Tabel 4.1  
Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2021

No	Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 17.500.000	Rp 17.500.000	Rp 0
2	Sidang di Luar Gedung Peradilan	Rp 42.578.000	Rp 42.578.000	Rp 0
3	Pos Bantuan Hukum	Rp 69.500.000	Rp 69.400.000	Rp 100.000
4	Layanan Sidang Terpadu	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 0
	<b>Total</b>	<b>Rp 179.978.000</b>	<b>Rp 179.878.000</b>	<b>Rp 100.000</b>



Gambar 4.1  
Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076

Adapun Belanja Barang dari DIPA 309076 berhasil mencapai realisasi sebesar 99,94 %, dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo melebihi target (35 perkara), yaitu 80 perkara. Kegiatan Sidang Diluar Gedung sebanyak 17 kegiatan dan Sidang Pelayanan Terpadu yang ditargetkan sebanyak 8 kegiatan berhasil terlaksana semua, serta Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum.

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### 1. Kendaraan Dinas

Ada dua jenis kendaraan dinas Pengadilan Agama Watampone, yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Total nilai aset kendaraan dinas jika dinilai dengan hitungan rupiah pada tahun 2021 adalah **Rp 455.024.828** (*empat ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Tabel 4.2  
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Kijang Innova	2007		√		
2.	Kijang Avanza	2011		√		
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Suzuki Shogun Racing FD 125 XRM	2006		√		
2.	Suzuki Tunder EN 125	2006		√		
3.	Yamaha Jupiter MX 286	2007	√			
4.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
5.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
6.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
7.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
8.	Suzuki Shogun R FL 125 SD	2009	√			

## 2. Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Agama Watampone yang berdiri di atas tanah seluas 1.308 M<sup>2</sup> merupakan gedung / kantor lama yang telah dilalihkan fungsikan menjadi rumah dinas.

Tabel 4.3  
Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2.	Rumah Dinas Panitera	1		√		
3.	Rumah Dinas Sekretaris	1		√		

<b>Tanah Bangunan Rumdis seluas</b>	<b>1.308 M2</b>	<b>Rp. 1.406.704.000</b>
<b>Rumah Dinas</b>	<b>449 M2</b>	<b>Rp. 720.981.000</b>
<b>Nilai aset (dalam rupiah)</b>		<b>Rp. 2.127.685.000</b>

Total nilai aset rumah dinas (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.127.685.000,-** (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

## 3. Bangunan Gedung Kantor

Gedung Pengadilan Agama Watampone yang sekarang ini, diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2008 oleh DR. H.A. Harifin Tumpa, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI saat itu. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.424 M<sup>2</sup> dan telah resmi ditempati sejak peresmian.

Tabel 4.4  
Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Ruang Ketua	1	

2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Kesekretariatan Akreditasi Penjaminan Mutu	1	
10	Ruang Kesekretariatan	1	
11	Ruang Bendahara	1	
12	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
13	Ruang Pusat PTSP	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Media Center	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Juru Sita	1	
19	Ruang Arsip Perkara	1	
20	Dapur / pantri	1	
21	Toilet Umum	4	
22	Ruang Tunggu Persidangan	1	
23	Ruang Posbakum	1	
24	Ruang TI	1	
25	Pos Keamanan	2	
26	Mushollah	1	
27	Tempat Parkiran	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	

<b>Tanah Bangunan Kantor seluas</b>	<b>3.424 M2</b>	<b>Rp. 3.832.124.000</b>
<b>Gedung dan Bangunan Kantor</b>	<b>1.823 M2</b>	<b>Rp. 6.095.150.000</b>
<b>Nilai aset (dalam rupiah)</b>		<b>Rp. 9.927.274.000</b>

Total nilai aset Bangunan Gedung Kantor (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 9.927.274.000,-** (*sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

#### 4. Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Total nilai aset sarana / prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.325.057.318,-** (*dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

Rincian jumlah sarana dan prasarana Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5  
Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran  
Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	B	RR	RB	Keterangan
1	Lemari Besi/Metal	69	69	-	-	
2	Lemari kayu	6	5	1	-	
3	Rak Besi	1	1	-	-	
4	Rak kayu	2	-	2	-	
5	Filling Kabinet Besi	1	1	-	-	
6	Brandkas	2	2	-	-	
7	Tabung Pemadam	5	5	-	-	
8	CCTV	1	1	-	-	
9	Papan Visual	5	3	1	1	Proses Penghapusan
10	Mesin Antrian	1	1	-	-	
11	Mesin Absensi	2	1	-	1	Proses Penghapusan
12	Stempel timbul bulat	1	-	-	1	Proses Penghapusan
13	Perkakas Kantor Lainnya	1	1	-	-	
14	Meja kerja kayu	65	64	-	1	Proses Penghapusan
15	Kursi Besi/Metal	191	155	-	36	Proses Penghapusan
16	Kursi Kayu	12	12	-	-	
17	Sice	5	4	1	-	
18	Meja Rapat	2	2	-	-	
19	Tempat Tidur Besi	1	-	-	1	Proses Penghapusan
20	Meja Telpon	1	1	-	-	
21	Meja Resepsionis	2	2	-	-	
22	Sketsel	2	2	-	-	
23	Kursi Tunggu	7	7	-	-	
24	Jam Elektronik	1	-	-	1	Proses Penghapusan
25	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-	
26	Lemari Es	7	6	-	1	Proses Penghapusan

27	A.C. Split	21	18	1	2	Proses Penghapusan
28	Kipas Angin	1	1	-	-	
29	Kompor Gas	1	-	1	-	
30	Tabung Gas	1	1	-	-	
31	Televisi	6	6	-	-	
32	Sound System	1	-	-	1	Proses Penghapusan
33	Lambang Garuda Pancasila	2	-	2	-	
34	Gambar Presiden/Wapres	2	-	2	-	
35	Tiang Bendera	6	6	-	-	
36	Tangga Aluminium	1	1	-	-	
37	Kaca Hias	6	6	-	-	
38	Mimbar/Podium	1	1	-	-	
39	Palu Sidang	2	-	2	-	
40	Lambang Instansi	1	1	-	-	
41	Gordyn/Kray	1	1	-	-	
42	Asbak Tinggi	4	4	-	-	
43	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	6	-	-	
44	Kamera Digital	1	-	-	1	Proses Penghapusan
45	Telephon (PABX)	1	1	-	-	
46	Pesawat Telepon	1	1	-	-	
47	Facsimile	1	-	-	1	Proses Penghapusan
48	Genset	1	1	-	-	
49	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-	
50	P.C. Unit	24	19	-	5	Proses Penghapusan
51	Laptop	32	27	-	5	Proses Penghapusan
52	Printer	16	6	1	9	Proses Penghapusan
53	Scanner	1	1	-	-	
54	Server	2	2	-	-	
55	Router	3	3	-	-	
56	Rak Server	2	2	-	-	
57	Kabel UTP	3	3	-	-	
58	Wireless Access Point	2	2	-	-	
59	Switch	6	6	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>554</b>	<b>473</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	

Sarana / prasarana fasilitas kantor secara keseluruhan berjumlah 554 unit, dengan rincian 473 unit dalam kondisi baik, 14 unit rusak ringan dan 67 unit rusak berat. Sarana / prasarana fasilitas kantor dalam kondisi rusak

berat sudah dalam proses penghapusan, menunggu Surat Keputusan Penghapusan dari Biro Perlengkapan Badan Urusan Mahkamah Agung RI.

**a. Pengadaan**

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran pengadaan untuk peralatan dan mesin :

- 1) PC. Kepaniteraan sebanyak 3 unit,
- 2) Mesin Antrian Sidang sebanyak 1 unit.

**b. Pemeliharaan**

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone mendapat anggaran untuk belanja biaya pemeliharaan, berupa :

- 1) Peralatan dan mesin yang meliputi : pemeliharaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komputer/PC, AC, genset, laptop/notebook, dan printer.
- 2) Pemeliharaan gedung dan bangunan, meliputi : pemeliharaan pos jaga, pemeliharaan gedung kantor dan halaman.
- 3) Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya meliputi : pemeliharaan rumah dinas.

Total aset barang milik negara tahun anggaran 2021 dalam hitungan rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	5.238.828.000,-
2	Peralatan Dan Mesin	2.325.057.318,-
3	Gedung dan Bangunan	7.779.656.000,-
4	Jaringan	19.988.100,-
5	Aset Tetap Lainnya	15.354.679,-
6	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.990.237.559,-)
7	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(774.774.909,-)
8	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2.998.212,-)
9	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	427.904.400,-

10	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(12.844.628.883),-
11	Barang Konsumsi	946.300,-
Jumlah		<b>12.842.693.533,-</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa total aset negara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 setelah penyusutan adalah **Rp 12.842.693.533,-** (*dua belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*).

## C. Pengelolaan Teknologi Informasi

### 1. Implementasi e-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap pengadilan wajib menggunakan e-Court dalam penerimaan perkara. Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Watampone, dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online.

Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

#### a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau

usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi e-Court yang dapat diperoleh adalah :

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara

elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pada e-Litigasi ini, acara persidangan secara elektronik oleh para pihak, dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim / hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis / hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Tabel 4.7

Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021

No	Kategori Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan	21	111	123	9
2	Permohonan	3	29	32	-
	Total	24	140	155	9

Sisa perkara e-Court tahun 2020 sebanyak 24 perkara, dan semuanya sudah diputus. Pada tahun 2021, sebanyak 140 perkara e-Court yang masuk / diterima, tetapi hanya 5 perkara melalui e-Litigasi.

Tabel 4.8  
Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Tahapan Terakhir
1	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp	06 – 01 – 2021	Putus : 07-10-2021 (Dalam proses Banding)
2	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp	03 – 05 – 2021	28 – 12 – 2021, putus
3	680/Pdt.G/2021/PA.Wtp	22 – 06 – 2021	30 – 09 – 2021, putus
4	957/Pdt.G/2021/PA.Wtp	10 – 09 – 2021	13 – 12 – 2021, putus
5	1180/Pdt.G/2021/PA.Wtp	04 – 11 – 2021	04 – 01 – 2022, agenda sidang : Duplik Tergugat

## 2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi SIPP merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara.

Kemudahan penyediaan informasi perkara tidak terlepas dari peran aplikasi SIPP yang telah terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Watampone, sehingga informasi perkara yang sangat dibutuhkan seperti progres suatu perkara, jadwal sidang, dan informasi status perkara dapat diperoleh dengan mudah.

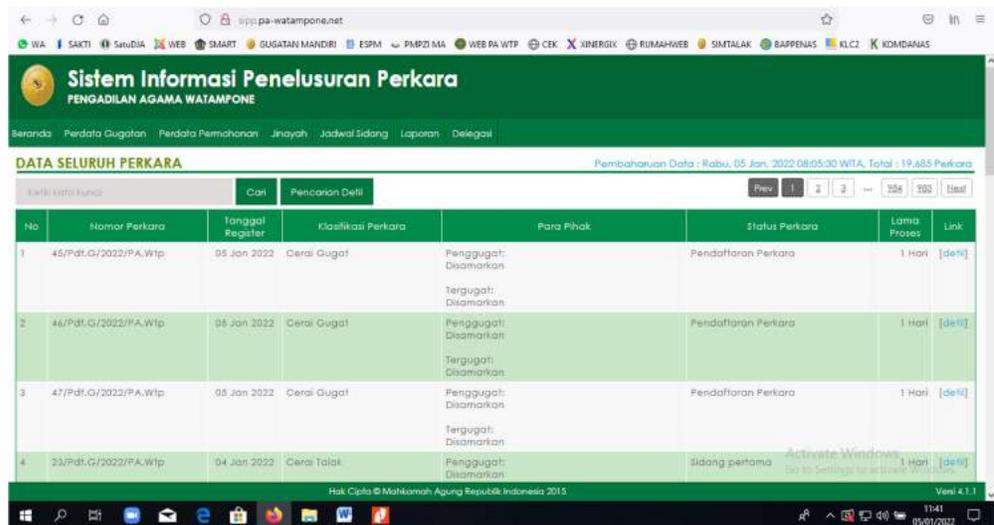
Aplikasi SIPP telah dimanfaatkan secara optimal oleh Pengadilan Agama Watampone, mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan PMH (Penunjukan Majelis Hakim), Penetapan Hari Sidang, relaas panggilan, keuangan perkara, pembuatan jadwal sidang, Berita Acara Sidang, hingga produk pengadilan (Putusan/Penetapan dan Akta Cerai).

Selain mengoptimalkan peran website yang terintegrasi dengan SIPP, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan SIPP adalah :

### a. SMS Gateway

Pihak berperkara dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara praktis dengan mengirimkan SMS ke nomor yang telah disediakan dan akan mendapatkan balasan secara otomatis.

- b. SIPANGGI (Sistem Informasi Panggilan Ghaib)  
Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dapat mengetahui informasi jadwal sidang.
- c. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)  
aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya.
- d. SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)  
Sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online kepada Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



Gambar 4.2  
Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone

Aplikasi SIPP yang terpasang di Pengadilan Agama Watampone sekarang adalah versi 4.1.1. Dengan diterapkannya aplikasi SIPP, maka publikasi perkara diharapkan dapat dilaksanakan secara *one day publish* yaitu perkara yang diproses pada hari itu dapat langsung dipublikasikan

pada hari tersebut, serta minutasikan berkas perkara dalam satu hari (*one day minutation*).

Adapun beberapa strategi yang ditempuh dalam implementasi program *one day minutation* dan *one day publish* adalah sebagai berikut :

a. Penyeragaman Format

Penyeragaman format yang digunakan dari awal sampai akhir proses persidangan mutlak diperlukan, meliputi penyeragaman gaya selingkung format surat Gugatan atau Permohonan (penulisan identitas, posita dan petitum), penyeragaman template BAS dan Putusan / Penetapan.

b. Peran Aktif Petugas Meja I dan Meja II

Petugas Meja I adalah pintu masuk seseorang beracara di Pengadilan. Dimana ia bertugas untuk menerima gugatan atau permohonan seseorang. Untuk efisiensi dan efektifitas proses selanjutnya, Petugas Meja I harus melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam surat gugatan atau permohonan yang diajukan.

Petugas Meja II merupakan pintu masuk data gugatan dan permohonan ke dalam aplikasi SIPP. Data yang *diinput* pertama kali, akan menentukan proses selanjutnya.

c. Adanya Koordinasi yang Baik antar Pihak Terkait dengan Perkara

Misalnya adanya koordinasi antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

d. Mempersiapkan Segala Sesuatunya dari Awal Sebelum Perkara Diputus

Untuk mengejar target *one day minutation* dan *one day publish*, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan sebelum persidangan dilakukan. Hal-hal seperti penyusunan jadwal sidang, penyusunan dan pengecekan berkas, pengecekan relaas panggilan, cetak instrumen panggilan atau instrumen pemberitahuan, pencetakan BAS sebelumnya, dan hal lainnya yang dibutuhkan, harus telah dipersiapkan sebelum

sidang. Begitu juga dengan kegiatan yang pasti dilakukan setelah persidangan.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Terdapat 7 (tujuh) area yang menjadi tolak ukur penilaian, yaitu :

1. Kepemimpinan (leadership)
2. Perencanaan strategis (strategic planning)
3. Fokus pelanggan (customer focus)
4. Dokumen system (document system)
5. Manajemen sumber daya (resources management)
6. Proses manajemen (process management)
7. Hasil kerja (performance result).

Akreditasi yang diberikan oleh Dirjen Badilag adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen Peradilan Agama yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi Dirjen Badilag terhadap semua Peradilan Agama di Indonesia.

SAPM merupakan bentuk pengawasan dan pemacu kantor peradilan untuk melakukan perubahan / peningkatan dalam pelayanan dan kenyamanan. Tujuan SAPM adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki pelayanan prima, sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035.

Assesment Eksternal APM surveillance III di Pengadilan Agama Watampone dilakukan oleh Tim Asessor dari PTA Makassar, yang dipimpin oleh Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian, H. Patahuddin Azis, S.Ag.



Gambar 5.1  
Closing Meeting Assesment Eksternal APM tanggal 12 November 2021

Sampai laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun, hasil assesment Eksternal APM surveillance III belum terbit.

## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Selain APM, PTSP merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung, dan juga merupakan bagian dari penilaian APM. Program ini mulai dikenalkan sejak tahun 2017 di beberapa pengadilan pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir di seluruh pengadilan Indonesia.

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara integritas dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan / pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

PTSP ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya.

Program PTSP terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai peradilan Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Pada PTSP Pengadilan Agama Watampone telah ditempatkan petugas layanan di loket-loket, di mana para pihak pencari keadilan dapat meminta layanan dan informasi. Bahkan juga telah ditempatkan petugas Bank BRI sebagai wujud layanan kepada masyarakat guna menerima panjar biaya perkara, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot dan jauh untuk menyetor biaya panjar perkara ke bank.

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegritas. Pelayanan administrasi terintegritas yang mudah, pasti, dan transparan dapat terwujud melalui PTSP.

## **1. Layanan Pokok PTSP**

### **a. Layanan Informasi / Pengaduan**

#### **1) Layanan Informasi**

Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan informasi, baik secara prosedur biasa dan prosedur khusus, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melayani permohonan informasi, baik yang diajukan secara lisan atau tulisan.

## 2) Layanan Pengaduan

Petugas pengaduan melayani pengaduan, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis.

### a) Pengaduan secara Lisan :

- Menghadap langsung petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan Agama Watampone pada jam kerja, mulai pukul 08:00 s/d 16:30 WITA.
- Menyampaikan secara lisan permasalahan / pengalaman yang dialami sebenarnya (tidak fiktif).

### b) Pengaduan secara tertulis :

- Menyampaikan / mengirim surat resmi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan cara :
  - Diantar langsung
  - Melalui Pos
  - Melalui Faximile (0481) 21018
  - Melalui E-mail: [watampone@pta-makassarkota.go.id](mailto:watampone@pta-makassarkota.go.id)
  - Melalui aplikasi SIWAS MA RI
- Menyertakan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

## b. Layanan Pendaftaran Perkara

Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :

- 1) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
- 2) Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
- 3) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Konsinyasi;

- 4) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Eksekusi;
- 5) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Layanan Pembayaran Perkara

Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pembayaran Perkara meliputi :

- 1) Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- 2) Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
- 3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 4) Pengembalian Sisa Panjar (PSP) Biaya Perkara;
- 5) Penyerahan bukti-bukti Pembayaran;
- 6) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan, yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :

- 1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- 2) Penyerahan Akta Cerai;
- 3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Layanan Penunjang PTSP**

a. Layanan Posbakum

Layanan Posbakum meliputi Konsultasi Hukum dan bantuan pembuatan Surat Gugatan atau Permohonan bagi Pencari Keadilan.

b. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara

Untuk sistem pembayaran biaya perkara, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal, yaitu PT BRI Cabang Watampone dengan System Payment Point yang ada lingkungan PTSP itu sendiri.

c. Layanan Materai dan Legalisir atau Nazzeglen

Untuk sistem layanan materai dan legalisir atau nazzeglen, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal yaitu PT POS Cabang Watampone.

### C. Inovasi Pelayanan Publik

Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan / masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama Watampone. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan / masyarakat.

Saat ini inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi keharusan sebagai alat penunjang pelayanan publik. Dukungan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat yang juga semakin modern dalam menggunakan media elektronik, memacu Pengadilan Agama Watampone melakukan terobosan inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan peningkatan kinerja bagi pegawai Pengadilan Agama Watampone, maka berikut ini beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut :

#### 1. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)

SIPETTUNI merupakan aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya. Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dengan sarana teknologi informasi sehingga memudahkan bagi para *stakeholder* yang terlibat dan mewujudkan pelayanan *one-day-service*. Aplikasi ini dibuat dari hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.



Gambar 5.2  
Tampilan Halaman Awal Aplikasi SIPETTUNI

Aplikasi ini terdiri dari halaman untuk pihak pencari keadilan, dan halaman untuk admin Dukcapil.

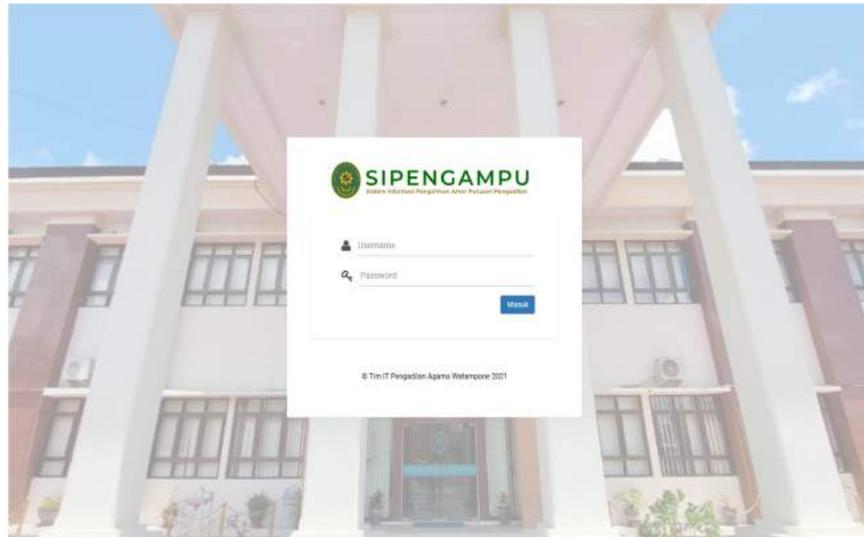
Gambar 5.3  
Tampilan Halaman untuk Pengguna



Gambar 5.4  
Tampilan Halaman untuk Admin

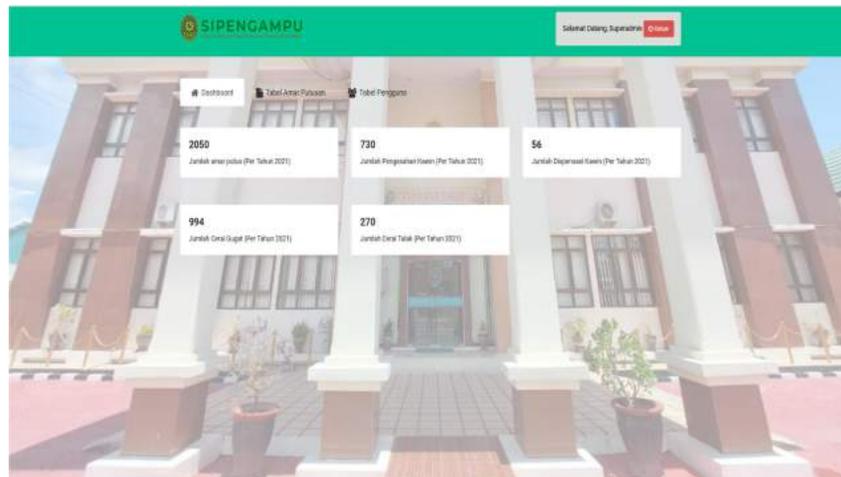
## 2. SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)

SIPENGAMPU merupakan sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dan Dinas DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil) sesuai dengan hasil kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan bagi KUA dan Dinas DUKCAPIL sebagai bahan validasi akta cerai dan putusan dari data perkara yang ada di Pengadilan Agama Watampone agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen seperti pemalsuan data dan lain sebagainya.



Gambar 5.5  
Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPENGAMPU

Aplikasi ini terdiri dari data jumlah perkara di Pengadilan Agama yang telah putus, baik cerai gugat, cerai talak, pengesahan nikah, dispensasi kawin maupun jenis perkara lainnya yang dapat dilihat atau diunduh oleh pihak KUA dan Dinas DUKCAPIL.



Gambar 5.6  
Tampilan Halaman Dashboard SIPENGAMPU

Proses ini dimulai dengan pengambilan data dari Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Watampone yang

diintegrasikan ke aplikasi SIPENGAMPU, dan selanjutnya dapat diakses oleh pihak KUA dan Dinas DUKCAPIL, sesuai dengan hak akses yang telah diberikan menurut user masing-masing.

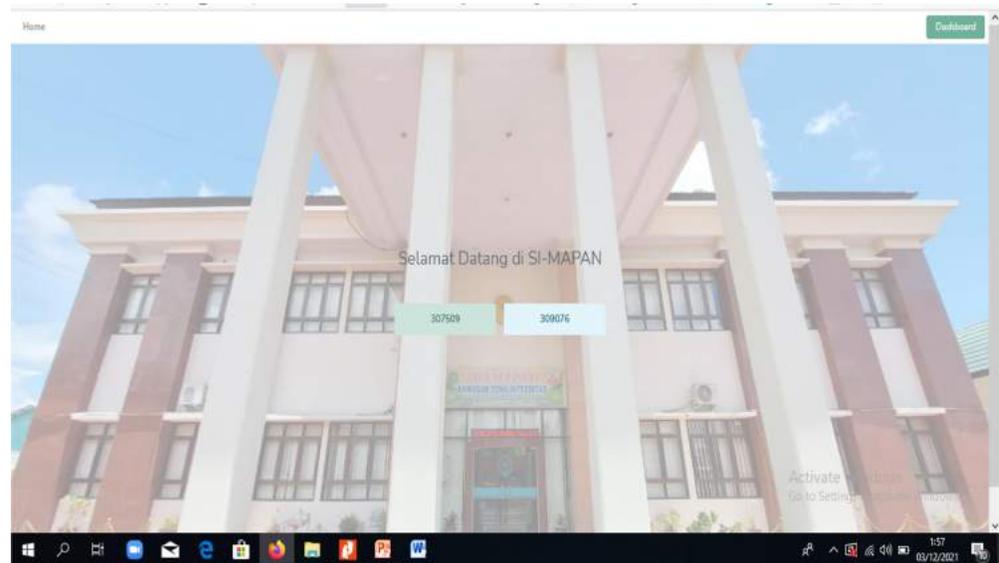
SIPENGAMPU merupakan upaya terobosan perubahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengiriman Amar dan Salinan Putusan kepada KUA dan Dinas DUKCAPIL dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, khususnya pada satuan kerja Pengadilan Agama Watampone. Karena mengingat ketika pengiriman Salinan Putusan masih dilakukan dengan cara manual, telah terjadi beberapa permasalahan adalah tidak adanya biaya pengiriman khusus, baik dari panjar biaya perkara maupun dari DIPA Pengadilan Agama Watampone, serta penggunaan waktu yang cukup lama, maka dengan terciptanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar sehingga kinerja institusi semakin lebih efektif dan efisien.

### **3. SI MAPAN**

Aplikasi SI MAPAN menyediakan informasi tentang program rencana kegiatan dan realisasi pelaksanaan anggaran secara digital, berbasis website dan dapat diakses oleh semua orang. Hal tersebut memberi kemudahan bagi Pimpinan / Pembuat Keputusan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, Tim Pengelola DIPA juga mudah dalam mengontrol realisasi pelaksanaan anggaran bulan berjalan.

Walaupun aplikasi SI MAPAN tidak berdampak secara langsung terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Watampone, tetapi SI MAPAN dapat memberikan dukungan layanan secara optimal terhadap pengelolaan anggaran.

Aplikasi SI MAPAN dapat diakses pada url : [simapan.pawatampone.net](http://simapan.pawatampone.net). Aplikasi SI MAPAN terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Home dan Login.



Gambar 5.7  
Tampilan Bagian Home (Sebelum Login)

Bagian Home memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi pengelolaan anggaran pada Pengadilan Agama Watampone. Pada bagian ini terdapat 2 tombol pilihan untuk menentukan data satker mana yang akan diakses, apakah 307509 untuk anggaran dari Badan Urusan Administrasi atau 309076 untuk anggaran dari Badan Peradilan Agama. Ketika kita pilih salah satu satker, maka akan muncul 5 menu utama sesuai target tahapan implementasi, dimana menu perencanaan sebagai default.

Home Contact Login

PERENCANAAN REALISASI SISA PAGU

DEVIASI HAL III SIMULASI RKK

Menu Perencanaan (307509)

dd/mm/yyyy Filter Cetak

Kode	Uraian	Page Total	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi	12.420.631.000	818.762.416	838.587.355	796.600.896	1.561.137.579	778.850.255	1.524.176.361	783.527.053	843.521.910	954.286.025	963.489.426	868.691.729	1.693.819.995
1066.EAA	Layanan Perkantoran (Base Like)	12.415.631.000	818.762.416	838.587.355	796.600.896	1.561.137.579	778.850.255	1.524.176.361	783.527.053	842.421.910	954.286.025	963.489.426	867.691.729	1.691.019.995
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran	12.415.631.000	818.762.416	838.587.355	796.600.896	1.561.137.579	778.850.255	1.524.176.361	783.527.053	842.421.910	954.286.025	963.489.426	867.691.729	1.691.019.995
001	Gaji dan Tunjangan	11.026.147.000	722.147.960	757.939.798	695.832.199	1.448.263.779	726.687.255	1.388.562.818	791.448.844	759.061.434	761.312.388	764.957.147	767.928.706	1.521.534.852
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	11.026.147.000	722.147.960	757.939.798	695.832.199	1.448.263.779	726.687.255	1.388.562.818	791.448.844	759.061.434	761.312.388	764.957.147	767.928.706	1.521.534.852
9121111	Belanja Gaji Pelecek PWS	3.163.211.000	202.068.800	207.897.100	197.590.400	405.849.200	202.922.600	398.797.400	199.308.800	210.254.200	209.392.300	210.215.300	210.629.700	958.288.300

Gambar 5.8  
Tampilan Menu Perencanaan Satker 307509 (Dashboard)

Pada menu perencanaan, terdapat filter tanggal revisi untuk melihat program rencana kegiatan pelaksanaan anggaran tiap bulan secara detail. Dengan tombol download, kita dapat mendownload data tersebut dalam bentuk file PDF dan mencetaknya.

Untuk bagian utama lainnya, yaitu Login, digunakan oleh user untuk mengupdate data pengelolaan anggaran.



Gambar 5.9  
Tampilan Dashboard (Setelah User Login)

## BAB VI PENGAWASAN

### A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan peradilan, dalam melakukan pengawasan Internal berpedoman kepada :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan,
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan,
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan keputusan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Watampone selaku pimpinan tertinggi pengadilan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai. Karena peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara sangat penting, pengawasan diperlukan untuk membina sikap dan perilaku disiplin, loyalitas, bertanggung jawab, jujur, dan

selalu mengembangkan sumber daya sehingga dapat meningkatkan kinerja yang mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat. Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendukung peningkatan tersebut dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus terhadap hakim dan pegawai.

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif,
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HaWasBid) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/140/PS.00/SK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang meliputi berbagai bidang, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui :
  - a. Eksaminasi Putusan
  - b. LKH (Laporan Kegiatan Hakim)

Pengawasan yang dilakukan HaWasBid untuk memastikan bahwa pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HaWasBid yang ditunjuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Koordinator Pengawas, diteruskan ke pimpinan serta Hakim Tinggi Pengawas Daerah setiap bulan.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan, sehingga dapat

segera dilakukan penanganan yang terbaik terhadap sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan agar dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan oleh stakeholder di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk rapat evaluasi menyeluruh setiap bulan. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor dan di saat jam kerja;
- Konsistensi penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasir dan user SIPP lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Menjaga Kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Implementasi aplikasi e-Court dan 11 (sebelas) aplikasi Inovasi Ditjen Badilag;
- Peningkatan kinerja seluruh hakim dan pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- Peningkatan ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam pembuatan laporan, dan pemberkasan perkara Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali.
- Akreditasi Penjaminan Mutu, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan tahun 2021 adalah 97,3%, dengan perhitungan perkara diterima tahun 2021 sejumlah 2.238 perkara ditambah perkara sisa tahun 2020 sejumlah 211 perkara sehingga total perkara yang ditangani tahun 2021 sejumlah 2.449 perkara dan berhasil diselesaikan sejumlah 2.383 perkara. Sisa perkara yang belum diselesaikan tahun 2021 sejumlah 66 perkara (2,7 %).
2. Penyerapan anggaran DIPA Satker 307509 tahun 2021 sebesar 96,39 %. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan program Dukungan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik;
3. Penyerapan anggaran DIPA Satker 309076 tahun 2021 sebesar 99,94 %. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program Penegakan Dan Pelayanan Hukum telah dilaksanakan dengan baik;
4. Dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan tugas peradilan sesuai ketentuan.

#### **B. Rekomendasi**

1. Sangat diperlukan peningkatan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang agar Pengadilan Agama Watampone dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan,
2. Perlu adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi / baik,

3. Perlu adanya penambahan pegawai untuk :
  - a. Pengelola perpustakaan,
  - b. Petugas meja informasi,
  - c. Panitera Pengganti,
  - d. Juru Sita / Juru Sita Pengganti,
4. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan pegawai untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 P.A. Watampone*



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 P.A. Watampone*



**SK TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
Nomor : W20-A2/159/SK/OT.01.1/XII/2021

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/004/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

## MEMUTUSKAN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TAHUN 2021.

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;
- Kedua : Tugas Tim adalah :
- a. Menginventarisir dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari sub-sub Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
  - b. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2021 sesuai outline.
  - c. Laporan dibuat dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 24 Desember 2021  
Ketua,



**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670730 199303 2 006**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Nomor : W20-A2/159/SK/OT.01.1/XII/2021

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

Penanggungjawab : Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. ( Ketua )  
Koordinator : Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. ( Wakil Ketua )  
Ketua : Drs. Rahmading, M.H. ( Panitera )  
Sekretaris : H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si. ( Sekretaris )  
Anggota : Drs. Jamaluddin ( Panitera Muda Hukum )  
Dra. Hj. Munirah ( Panitera Muda Gugatan )  
Bintang, S.H. ( Panitera Muda Permohonan )  
Maftukhah Mustafa, S.Kom. ( Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan )  
Nurhidayah, S.Ag, ( Kasubbag. Umum dan Keuangan )  
Hj. Asmah, S.H. ( Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala )  
Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P ( Analis Kepegawaian Ahli Pertama )

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 24 Desember 2021

Ketua



**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670730 199303 2 006**

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 P.A. Watampone*



# **DAFTAR BEZETTING**

**KEKUATAN PEGAWAI / BEZZETING**  
**UNIT KERJA: PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	PEG NIP	NAMA LENGKAP	P/L	TGL LAHIR	TEMPAT LAHIR	TMT GOL	GOL	USIA	JABATAN	INSTANSI	KLS
1	19670730.199303.2.006	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	P	30/07/1967	Kalosi	01/04/2021	IV/d	54	Ketua	PA. WATAMPONE	IA
2	19671231.199403.2.020	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	P	31/12/1967	Wonomulyo	01/10/2018	IV/c	54	Wakil Ketua	PA. WATAMPONE	IA
3	19580324.198703.1.004	Drs. H. Kamaluddin	L	24/03/1958	Soppeng	01/04/2019	IV/d	63	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
4	19580506.197803.1.001	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H.	L	06/05/1958	Watampone	01/10/2016	IV/d	63	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
5	19621229.199103.2.004	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.	P	29/12/1962	Sengkang	01/04/2018	IV/d	59	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
6	19570607.199302.2.001	Hj. St. Aisyah S., S.H.	P	07/06/1957	Soppeng	01/04/2021	IV/d	64	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
7	19630310.199203.2.008	Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.	P	10/03/1963	Ganra Soppeng	01/10/2020	IV/d	58	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
8	19581231.198703.1.030	Drs. H. M. Tang, M.H.	L	31/12/1958	Laceno	01/10/2018	IV/d	63	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
9	19640627.199203.2.003	Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.	P	27/06/1964	Luwu	01/04/2018	IV/d	57	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
10	19630808.198903.1.005	Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	L	08/08/1963	Pinrang	01/10/2019	IV/d	58	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
11	19630505.199403.2.002	Dra. St. Mahdianah. K., M.H.	P	05/05/1963	Cenrana	01/04/2018	IV/c	58	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
12	19691126.199403.2.002	Dra. Ernawati	P	26/11/1969	Sidenreng Rappang	01/10/2018	IV/c	52	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
13	19591231.198803.1.027	Drs. Dasri Akil, S.H.	L	31/12/1959	Watampone	01/10/2018	IV/d	62	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
14	19561228.198203.1.005	Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.	L	28/12/1956	Parepare	01/10/2020	IV/d	65	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
15	19581231.198203.2.021	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	P	31/12/1958	Sengkang	01/04/2019	IV/c	63	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
16	19571231.199203.1.012	Drs. Abd. Rahman	L	31/12/1957	Sailong	01/10/2021	IV/c	64	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
17	19631231.198203.1.017	Drs. Muhammadong, M.H.	L	31/12/1963	Bone	01/10/2017	IV/d	58	Hakim	PA. WATAMPONE	IA

18	19571231.198103.1.069	Drs. H. M. Suyuti, M.H.	L	31/12/1957	Makassar	01/04/2020	IV/d	64	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
19	19660212.199401.2.001	Dra. Hj. Sitti Amirah	P	12/02/1966	Pangkep	01/04/2018	IV/c	55	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
20	19571231.199203.1.011	Drs. Nurmaali	L	31/12/1957	Watampone	01/10/2018	IV/c	64	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
21	19750202.200112.2.004	Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.	P	02/02/1975	Parepare	01/04/2020	IV/b	46	Hakim	PA. WATAMPONE	IA
22	19650727.199603.1.001	Drs. H. Rahmading, M.H.	L	27/07/1965	Polmas	01/04/2016	IV/b	56	Panitera	PA. WATAMPONE	IA
23	19621231.199402.2.002	Dra. Hj. Munirah	P	31/12/1962	Macope	01/10/2005	III/d	59	Panitera Muda Gugatan	PA. WATAMPONE	IA
24	19700912.199203.1.004	Bintang, S.H.	L	12/09/1970	Calo	01/10/2012	III/d	51	Panitera Muda Permohonan	PA. WATAMPONE	IA
25	19620412.199203.1.006	Drs. Jamaluddin	L	12/04/1962	Watampone	01/10/2008	III/d	59	Panitera Muda Hukum	PA. WATAMPONE	IA
26	19611231.199203.2.009	Dra. St. Naisyah	P	31/12/1961	Maradda	01/10/2007	III/d	60	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
27	19631011.199103.2.002	Dra. Hunaena	P	11/10/1963	Watampone	01/04/2003	III/d	58	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
28	19670412.199403.2.002	Dra. Hj. Rosmini	P	12/04/1967	Uloe	01/04/2006	III/d	54	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
29	19730405.199803.1.004	Haris, S.H.I., M.Sy.	L	05/04/1973	Lampoko	01/10/2016	III/d	48	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
30	19630421.198802.2.001	Hj. Kartini, S.H.	P	21/04/1963	Parepare	01/04/2016	III/d	58	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
31	19670728.200012.2.001	Siti Jamilah, S.H.	P	28/07/1967	Makassar	01/04/2013	III/d	54	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
32	19681231.200312.2.002	Dra. Hj. Samsang	P	31/12/1968	Kampuno	01/04/2019	III/d	53	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
33	19741017.200112.2.002	Hj. Fitriani, S.Ag.	P	17/10/1974	Ujung Pandang	01/04/2014	III/d	47	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
34	19731105.200112.1.001	Andi Suardi, S.Ag.	L	05/11/1973	Kampuno	01/04/2014	III/d	48	Panitera Pengganti	PA. WATAMPONE	IA
35	19820918.200912.2.003	Hj. Naimah Nurdin, Lc.,	P	18/09/1982	Ujung Pandang	01/04/2018	III/c	39	Panitera	PA. WATAMPONE	IA

		S.Hi., M.Th.I.							Pengganti		
36	19660709.199403.1.004	Muhammad Suardi, S.H.	L	09/07/1966	Bone	01/10/2019	III/d	55	Juru Sita	PA. WATAMPONE	IA
37	19730101.200604.1.019	Muhammad Syahrani, S.H.	L	01/01/1973	Walenreng	01/10/2019	III/c	48	Juru Sita	PA. WATAMPONE	IA
38	19900709.200912.2.001	Ridmajayanti, S.Sos.	P	09/07/1990	Taddagae	01/04/2019	III/b	31	Juru Sita	PA. WATAMPONE	IA
39	19830808.201408.2.001	Agustiawati, S.E., S.H.	P	08/08/1983	Watampone	01/10/2020	III/b	38	Juru Sita	PA. WATAMPONE	IA
40	19851014.200912.2.004	Heriawati, S.H.	P	14/10/1985	Bone	01/04/2019	III/a	36	Juru Sita	PA. WATAMPONE	IA
41	19741214.200604.1.002	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.	L	14/12/1974	Bandung	01/04/2018	IV/a	47	Sekretaris	PA. WATAMPONE	IA
42	19661127.198703.2.001	Hj. Asmah, S.H.	P	27/11/1966	Bone	01/04/2015	III/d	55	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PA. WATAMPONE	IA
43	19860324.201101.2.014	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	P	24/03/1986	Sinjai	01/04/2021	III/d	35	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	PA. WATAMPONE	IA
44	19780705.200212.2.001	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	P	05/07/1978	Walenreng	01/04/2018	IV/a	43	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	PA. WATAMPONE	IA
45	19960210.201903.1.007	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P.	L	10/02/1996	Magetan	01/03/2019	III/a	25	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	PA. WATAMPONE	IA
46	19960902.202012.1.004	Panggih Tridarma, S.Kom	L	02/09/1996	Semarang	01/12/2020	III/a	25	CPNS / Pranata Komputer	PA. WATAMPONE	IA
47	19951016.202012.2.008	Rofika Khoirotn Nisa, A.Md.	P	16/10/1995	Kendal	01/12/2020	II/c	26	CPNS / Arsiparis	PA. WATAMPONE	IA

									Pelaksana		
48	19950502.202012.1.004	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md	L	02/05/1995	Banyumas	01/12/2020	II/c	26	CPNS / Pengelola Barang Milik Negara	PA. WATAMPONE	IA

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 P.A. Watampone*



## **DATA INVENTARIS**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 06-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKT

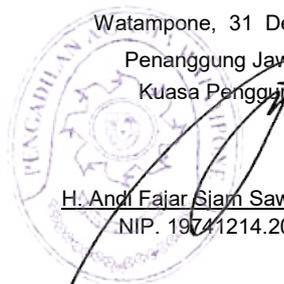
NAMA UAKPB : 005.01.19.307509.000 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	946,300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117199	Persediaan Lainnya	0
131111	Tanah	5,238,828,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,325,057,318
133111	Gedung dan Bangunan	7,779,656,000
134113	Jaringan	19,988,100
135121	Aset Tetap Lainnya	15,354,679
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 1,990,237,559)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( 774,774,909)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	( 2,998,212)
162161	Lisensi	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	427,904,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	( 197,030,584)
J U M L A H		12,842,693,533

Watampone, 31 Desember 2021

Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Siam Sawerilongi, SE., M.Si  
NIP. 19741214.200604.1.002



*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 P.A. Watampone*



## **DATA KEUANGAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01  
Tanggal : 04 January 2022  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
WA	Program Dukungan Manajemen								
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								
EAA	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,019,291,000	2,883,161,000	211,325,300	2,866,247,000	0	2,866,247,000	99.41	16,914,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,000	43,000	2,899	38,564	( 95)	38,469	89.46	4,531
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	234,352,000	231,181,000	14,365,590	196,343,840	0	196,343,840	84.93	34,837,160
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55,220,000	54,682,000	2,973,474	43,681,630	0	43,681,630	79.88	11,000,370
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	2,880,000	40,320,000	0	40,320,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,630,280,000	5,488,000,000	405,010,000	5,432,820,000	0	5,432,820,000	98.99	55,180,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,488,475,000	967,521,000	60,086,548	859,614,875	0	859,614,875	88.85	107,906,125
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	121,862,000	121,862,000	7,966,200	112,251,000	0	112,251,000	92.11	9,611,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	510,312,000	510,312,000	76,758,000	421,417,000	0	421,417,000	82.58	88,895,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	70,881,000	62,215,000	545,000	8,935,000	0	8,935,000	14.36	53,280,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	388,800,000	388,800,000	28,350,000	328,050,000	0	328,050,000	84.38	60,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	13,559,833,000	10,748,097,000	810,263,011	10,309,718,909	( 95)	10,309,718,814	95.92	438,378,186
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13,559,833,000	10,748,097,000	810,263,011	10,309,718,909	( 95)	10,309,718,814	95.92	438,378,186



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN**  
**SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBSB 01  
Tanggal : 04 January 2022  
Halaman : 3  
Prog.Id : lu\_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	51,340,000	42,040,000	2,450,000	42,040,000	0	42,040,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,340,000	42,040,000	2,450,000	42,040,000	0	42,040,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,389,484,000	1,410,384,000	161,006,874	1,410,373,368	0	1,410,373,368	100.00	10,632
	JUMLAH BELANJA KRO 1066.EAA	14,949,317,000	12,158,481,000	971,269,885	11,720,092,277	( 95)	11,720,092,182	96.39	438,388,818
EAC	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH BELANJA KRO 1066.EAC	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066	14,954,317,000	12,163,481,000	971,424,885	11,721,842,277	( 95)	11,721,842,182	96.37	441,638,818
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
EAD	Layanan Sarana Internal								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH BELANJA KRO 1071.EAD	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.WA	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01  
Tanggal : 04 January 2022  
Halaman : 4  
Prog.Id : lu\_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	( 95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01  
Tanggal : 04 January 2022  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,646,000	17,646,000	0	17,646,000	0	17,646,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,046,000	18,046,000	0	18,046,000	0	18,046,000	100.00	0
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	69,100,000	69,100,000	12,000,000	69,000,000	0	69,000,000	99.86	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	69,100,000	69,100,000	12,000,000	69,000,000	0	69,000,000	99.86	100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,832,000	92,832,000	0	92,832,000	0	92,832,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	92,832,000	92,832,000	0	92,832,000	0	92,832,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA KRO 1053.QBA	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA  
 WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
 SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01  
 Tanggal : 04 January 2022  
 Halaman : 2  
 Prog.Id : lu\_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 P.A. Watampone*



**SK HAWASBID**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**Nomor: W20-A2/146 /PS.00/SK/VIII/2021**

**Tentang**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan responentif Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Peradilan Agama Watampone;
  - b. Bahwa nama-nama Hakim pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diberi tugas Hakim Pengawas Bidang dimaksud di atas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan melekat;
  5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/1994 tentang Pola Pembinaan dan Penedalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

## MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/129/PS.00/SK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Watampone;
- Pertama : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone;
- Kedua : Tugas Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan seksama dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan;
- Ketiga : Uraian tugas masing-masing Pengawas Bidang akan disusun sesuai lampiran;
1. Manajemen Peradilan :
    - a. Program Kerja
    - b. Pelaksanaan/pencapaian target
    - c. Pengawasan dan Pembinaan
    - d. Kendala dan hambatan
    - e. Faktor-faktor yang mendukung
    - f. Evaluasi kegiatan
  2. Administrasi Perkara :
    - a. Prosedur penerimaan perkara
    - b. Prosedur penerimaan permohonan banding
    - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
    - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
    - e. Keuangan perkara
    - f. Pemberkasan perkara dan kearsipan
    - g. Pelaporan
  3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
    - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim
    - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
    - c. Minutasi perkara
    - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi)
  4. Administrasi Umum :
    - a. Kepegawaian
    - b. Keuangan
    - c. Inventaris
    - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
    - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
  5. Kinerja pelayanan publik :
    - a. Pengelolaan manajemen
    - b. Mekanisme pengawasan
    - c. Kepemimpinan
    - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

- e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
  - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian
  - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara
  - h. Tingkat pengaduan masyarakat
  - i. Pelaksanaan Tugas petugas PTSP
- Keempat : Hakim Pengawas Bidang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone sebagai Koordinator Pengawas;
- Kelima : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan rapat evaluasi terhadap permasalahan yang ditemukan dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Pengawas Bidang setiap triwulan. Selanjutnya mengupayakan solusi pemecahan terhadap kendala yang dihadapi dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone;
- Keenam : Koordinator dan Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan petunjuk Ketua Pengadilan Agama Watampone;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021  
Ketua,



**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670730 199303 2 006**

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/140 /PS.00/SK/VIII/2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

Tentang : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone

**HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

<b>NO</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>		<b>NAMA/ NIP</b>	<b>SEKRETARIS</b>
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang		<b>Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.</b> NIP. 19671231 199403 2 020	Ahmad Amiruddin
1.	Manajemen Peradilan	Pelaksanaan program kerja dan Pelaksanaan <i>Job Description</i> , RKA-KL dan SOP, Pencapaian Target	<b>Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.</b> NIP. 19750202 200112 2 004	Zelviana
		Pengawasan & Pembinaan, Kendala & Hambatan, Faktor-Faktor Pendukung, dan Evaluasi Kegiatan	<b>Drs. H. M. Suyuti, M.H.</b> NIP. 19571231 198103 1 069	Amin Firdaus
2.	Administrasi Perkara	Administrasi Perkara Gugatan dan Permohonan, Banding, Kasasi, PK (manual & elektronik)	<b>Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.</b> NIP. 19640627 199203 2 003	Satriani
		Administrasi Keuangan Perkara dan PNBPNP	<b>Dra. St. Mahdianah K., M.H.</b> NIP. 19630505 199403 2 002	Imelda Machmud
		Pemberkasan Perkara, Administrasi Mediasi, Pelaporan dan Arsip Perkara	<b>Dra. Ernawati, M.H.</b> NIP. 19691126 199403 2 002	A. Achmad Husain
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim	<b>Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.</b> NIP. 19630310 199203 2 008	Indah Sarina

		Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara		
		Minutasi Perkara, Penyitaan dan Pelaksanaan Putusan	<b>Hj. St. Aisyah S., S.H.</b> NIP. 19570607 199302 2 001	Muh.Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Administrasi Umum Keuangan, dan Inventaris	<b>Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.</b> NIP. 19621229 199103 2 004	Hermawati
		Administrasi Kepegawaian	<b>Drs. Muhammadong, M.H.</b> NIP. 19631231 198203 1 017	Abdul Muhaemin
		Administrasi Perencanaan Teknologi dan Pelaporan	<b>Dra. Hj. Sitti Amirah</b> NIP. 19611002 198803 2 001	Arvina
		Pembinaan Mental dan Kedisiplinan ASN	<b>Drs. H. Muh. Yusuf HS., S.H.</b> NIP. 19580506 197803 1 001 <b>Drs. Nurmaali</b> NIP. 19571231 199203 1 011	Satriani
5.	Kinerja pelayanan publik	Meja Informasi dan Pengaduan	<b>Drs. Dasri Akil, S.H.</b> NIP. 19591231 198803 1 027	A. Ulfiyah Nur
		Penataan Tata Ruang, Lingkungan dan K3	<b>Dra. Hj. Badriyah, S.H.</b> NIP. 19581231 198203 2 021	
		Implementasi aplikasi SIPP, E-Court dan E-Litigasi	<b>Drs. H. Muh. Tang, M.H.</b> NIP. 19581231 198703 1 030	Fathurrazak
		Pelayanan Pos Bantuan Hukum		
		Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung/Terpadu	<b>Drs. Abd. Rahman</b> NIP. 19571231 199203 1 012	Iriani
		PTSP dan Pelayanan Publik	<b>Drs. H. Kamaluddin, S.H.</b> NIP. 19580324 198703 1 004	Dyta Nurul Yunus

		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.</b> NIP. 19630808 198903 1 005 <b>Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.</b> NIP. 19561228 198203 1 005	Hamdani Azis
--	--	--	--	--------------

Ketua,



**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**  
NIP. 19670730.199303.2.006

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Peringgal.

# Foto-Foto Kegiatan Tahun 2021

## 1. Apel Senin Pagi dan Jumat Sore



## 2. Upacara Peringatan Hari Nasional



## 2. Penilaian Eksternal APM



## 3. Pengawasan Eksternal



#### 4. Rapat Koordinasi Bulanan



#### 5. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW



## 6. Rapat SIPP Melalui Zoom



## 7. Kerjasama dengan Stakeholder

